



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 8 Maret 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNIT KERJA : STAF AHLI

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KOSMAS DAMIANUS LANA**
2. Jabatan : **STAF AHLI GUBERNUR BIDANG POLITIK DAN PEMERINTAHAN**
3. NHK : **488073**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **757.800.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1186 m²/54 m² di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 275.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1176 m²/204 m² di KAB / KOTA KOTA KUPANG , HASIL SENDIRI Rp. 382.800.000
3. Tanah Seluas 1861 m² di KAB / KOTA MANGGARAI TIMUR, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **117.500.000**

1. MOBIL, NISSAN TERRANO Tahun 2002, HASIL SENDIRI Rp. 95.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 2.500.000
3. MOTOR, HONDA F1C02N28L0 A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **----****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **5.000.000****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----**

Sub Total Rp. **880.300.000**

III. HUTANG Rp. **19.467.000**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. **860.833.000**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.